

EKSPEKTASI DALAM KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM DAN DAMPAKNYA

Rasbin^{*)}



Abstrak

Kebijakan kenaikan harga BBM diambil dan ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa lampau dan masa depan, yakni adanya ekspektasi jika harga BBM tidak dinaikkan maka defisit anggaran akan lebih dari tiga persen. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan kenaikan harga BBM ini sudah terjadi sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, yakni naiknya beberapa harga produk-produk komoditas, begitu juga setelah kebijakan ini ditetapkan. Pihak yang paling merasakan dampak kebijakan ini adalah masyarakat ekonomi lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem atau BLSM).

A. Pendahuluan

Ekspektasi atau ramalan tentang masa depan dalam bidang ekonomi dibuat berdasarkan segala informasi yang ada padanya, apakah itu dari informasi pasar, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan internasional, dan sebagainya. Ekspektasi secara umum terbagi dalam tiga jenis yaitu ekspektasi statis, ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Jenis ekspektasi yang biasanya digunakan dalam perumusan kebijakan adalah ekspektasi rasional (*rational expectation*).

Dalam membuat kebijakan, Pemerintah Indonesia, juga menggunakan dan mempertimbangkan Teori Ekspektasi

(baik Adaptif maupun Rasional). Begitu juga dengan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diambil oleh pemerintah. Karena di dalam ekspektasi rasional, tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu saja (ekspektasi adaptif) tetapi juga berdasarkan pada keyakinannya tentang kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yakni adanya ekspektasi bahwa jika harga BBM tidak dinaikkan maka subsidi BBM akan menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari tiga persen.

Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, harga premium bersubsidi seharusnya berada pada kisaran Rp7.000,—Rp8.000,— (harga keekonomisan)

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: ras9bin@yahoo.co.id



bukan Rp4.500,- (harga jual). Karena, rendahnya harga BBM bersubsidi tersebut telah mendorong orang-orang melakukan tindakan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi.

Spread antara harga keekonomian dan harga jual itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Apalagi seiring berjalannya waktu, konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi kuota yang ditetapkan. Misalnya sektor transportasi, konsumsi BBM bersubsidi meningkat dari 41,2 juta kiloliter (KL) tahun 2011 menjadi 45,1 juta KL tahun 2012. Jika konsumsi BBM bersubsidi ini terus meningkat maka belanja subsidi BBM juga meningkat. Pada APBN-P 2012, realisasi belanja subsidi mencapai Rp211,9 triliun. Jumlah ini melebihi pagu belanja subsidi sebesar Rp137,4 triliun.

Selain itu, kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013 juga disebabkan oleh beberapa ekspektasi. *Pertama*, saat ini harga BBM di Indonesia adalah yang termurah di kawasan ASEAN bahkan termurah di dunia untuk negara yang terkategori *net importer*. Misalnya Vietnam, harga BBM-nya (RON 92) sebesar Rp15.553,-; Laos Rp13.396,-; Kamboja Rp13.298,-; dan Myanmar Rp10.340,-. Hal ini berpotensi menimbulkan kegiatan penyelundupan BBM ke luar negeri. *Kedua*, harga BBM yang murah berpotensi menghambat munculnya energi alternatif (yakni bahan bakar nabati seperti berbahan dasar *etanol* ataupun *crude palm oil*/CPO).

B. Ekspektasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah akan berdampak terhadap masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Begitupun dengan kebijakan kenaikan harga BBM per 22 Juni 2013, yakni harga premium yang sebelumnya Rp4.500,- naik menjadi Rp6.500,- dan solar menjadi Rp5.500,- (harga sebelumnya Rp4.500,-). Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan harga BBM tersebut lebih didominasi oleh dampak negatif daripada positifnya.

Dalam konsep ekspektasi, ekspektasi digunakan oleh agen-agen ekonomi dalam mengambil keputusan yang terkait untuk waktu di masa mendatang. Artinya keputusan yang akan ditetapkan untuk periode yang akan datang tapi diambil pada saat sekarang maka agen-agen ekonomi akan mempertimbangkan ekspektasi atau ramalan keadaan yang terjadi di masa lampau (ekspektasi adaptif) dan/atau masa mendatang (ekspektasi rasional).

Dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM, masyarakat merespon kebijakan tersebut dengan menaikkan harga beberapa barang komoditas sebelum kebijakan tersebut ditetapkan tanggal 22 Juni 2013. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi sehingga akhirnya harga produk/komoditas akan meningkat.

Dalam kasus kenaikan harga BBM, masyarakat (dalam hal ini pedagang) menaikkan harga komoditas yang dijualnya walaupun kebijakan tersebut belum ditetapkan. Hal ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami pada waktu sebelumnya saat sebelum kenaikan harga BBM.

Masyarakat sebagai konsumen juga merasakan dampak kenaikan harga BBM walaupun kebijakan tersebut belum ditetapkan. Beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan sebelum kebijakan kenaikan harga BBM ditetapkan seperti sayur mayur, beras, minyak goreng, telur, tepung, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Selain kebutuhan pokok masyarakat, dampak kenaikan harga BBM juga dialami oleh sektor perbankan. Sebelum kebijakan kenaikan harga BBM ditetapkan, adanya wacana kenaikan harga BBM maka Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 13 Juni 2013 menetapkan *BI Rate* naik sebesar 25 *basis points* (bps) menjadi enam persen (sebelumnya 5,75 persen).

Kenaikan *BI Rate* tersebut disebabkan adanya ekspektasi inflasi yang meningkat terkait rencana kebijakan kenaikan harga BBM yang akan diambil oleh pemerintah. Juga adanya tekanan *administered prices* yang

cenderung meningkat terkait penerapan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik pada tahap ke-2 yang akan datang.

Akibat *BI Rate* meningkat maka diperkirakan suku bunga kredit juga akan meningkat. Berdasarkan pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kondisi stagnasi sehingga mengakibatkan pertumbuhan kredit perbankan tertahan hingga mencapai 50 persen. Karena suku bunga kredit diperkirakan meningkat maka resiko *nonperforming loan* (NPL) atau kredit macet juga akan meningkat.

Dampak yang paling dirasakan akibat kenaikan harga BBM adalah sektor riil yakni sektor industri. Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, kenaikan harga BBM akan berdampak pada biaya produksi industri. Menurut perhitungan Kementerian Perindustrian, kenaikan biaya produksi rata-rata sebesar 1,2 persen akibat kenaikan harga BBM premium. Sektor industri yang paling terkena dampak adalah industri tekstil dan alas kaki dimana biaya produksinya meningkat sebesar 1,54 persen. Sedangkan biaya produksi industri makanan dan minuman hanya naik 0,63 persen, industri semen sebesar 0,66 persen.

Kenaikan harga solar menjadi Rp5.500,- per liter akan meningkatkan biaya produksi rata-rata sebesar 0,6 persen. Biaya produksi industri makanan dan minuman hanya akan naik sebesar 0,31 persen, industri semen meningkat 0,33 persen, serta industri alas kaki dan tekstil meningkat sebesar 0,77 persen.

Selain biaya tersebut, ada juga biaya yang termasuk dalam *cost production* yang ikut meningkat yakni biaya transportasi buruh. Biaya transportasi buruh yang sebelumnya hanya sebesar Rp10.000,-—Rp30.000,- per hari akan ditambah Rp10.000,- per hari, sehingga biaya transportasi buruh menjadi Rp20.000,-—Rp40.000,- per hari.

Kenaikan harga BBM juga akan mempengaruhi sektor pekerja/buruh, di mana kemampuan para pekerja akan tergerus oleh meningkatnya harga di pasar (tingkat inflasi meningkat). Berdasarkan hal tersebut menimbulkan tuntutan dari para pekerja/buruh agar upah buruh ditingkatkan sebesar

50 persen. Tapi, berdasarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, kenaikan upah secara umum akibat kenaikan harga BBM belum dikaji dan kemungkinan akan dilakukan tahun depan.

Secara umum, dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM akan dirasakan oleh seluruh sektor ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya sektor ekonomi yang banyak mengkonsumsi BBM. Seperti siklus hidup, kenaikan harga BBM akan ikut mempengaruhi sektor ekonomi lainnya melalui sektor ekonomi tertentu sebagai perantara.

C. Kebijakan Antisipatif

Dalam perumusan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga mengaplikasikan konsep ekspektasi adaptif. Berdasarkan adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya (ekspektasi adaptif) kenaikan harga BBM akan menggerus kemampuan masyarakat akibat inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM.

Untuk mengantisipasi menurunnya kemampuan masyarakat ekonomi bawah, pemerintah juga menetapkan kebijakan penanggulangan dampak kenaikan harga BBM, dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau Balsem/BLSM sebesar Rp150.000,- per bulan per kepala keluarga (KK), walaupun kebijakan tersebut adalah kebijakan yang bersifat jangka pendek (hanya untuk empat bulan). Pemerintah mengharapkan dengan adanya kebijakan BLSM tersebut maka masyarakat yang terkena dampak dapat diminimalisasi.

Tapi, karena kebijakan ini bersifat jangka pendek sedangkan dampak kebijakan kenaikan harga BBM adalah selamanya maka diperlukan solusi lain yang bersifat jangka panjang. Salah satu yang terkena dampak bagi masyarakat ekonomi lemah adalah biaya untuk pendidikan. Oleh karena itu, agar siswa tidak putus sekolah akibat kenaikan harga BBM perlu adanya beasiswa pendidikan untuk masyarakat ekonomi lemah.

D. Penutup

Pihak yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat ekonomi bawah. Akibat kenaikan harga BBM, inflasi akan mengalami kenaikan. Adanya inflasi yang ditimbulkan akan menggerus kemampuan masyarakat ekonomi bawah (dan berpotensi meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia).

Untuk mengantisipasi hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan antisipatif dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau Balsem/BLSM. Selain itu diharapkan akan ada kebijakan lainnya yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan seperti beasiswa untuk masyarakat kurang mampu.

Selain kebijakan BLSM, pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI perlu memikirkan lagi kebijakan-kebijakan lain yang bersifat jangka panjang yang akan digunakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM (yang kemungkinan juga akan dilakukan pada periode-periode mendatang jika harga minyak mentah dunia terus meningkat atau defisit anggaran meningkat). Dengan demikian, kebijakan tersebut akan lebih efektif mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Rujukan:

1. "Inilah Alasan Kenapa Harga BBM Harus Naik," 4 Juni 2013, <http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses 22 Juni 2013.
2. "Harga BBM Naik, Golkar: Itu Pertimbangan Rasional," 12 Juni 2013, <http://news.liputan6.com>, diakses 22 Juni 2013.
3. "Sejarah Pemikiran Ekonomi (Aliran Ratem)," <http://dickyhendramulyadi.blog.com>, diakses 22 Juni 2013.
4. "Ekonomi Rasional: Pengertian Teori Ekspektasi Rasional," 27 Maret 2013, <http://ekonomirasional.blogspot.com>, diakses 22 Juni 2013.
5. "Ekspektasi Inflasi Akibat BBM Naik Jadi Alasan BI Naikkan *BI Rate*," 13 Juni 2013, <http://finance.detik.com>, diakses 22 Juni 2013.
6. "MS Hidayat: Kenaikan BBM Tambah Biaya Produksi Industri Naik 1,2%," <http://finance.detik.com>, diakses 22 Juni 2013.
7. "BBM Naik, Buruh Dapat Tambahan Upah Transportasi Rp10.000/Hari," 20 Juni 2013, <http://finance.detik.com>, diakses 22 Juni 2013.
8. "Siap-siap! Harga BBM Naik, Suku Bunga Kredit Ikut Melambung," 3 Juni 2013, <http://finance.detik.com>, diakses 22 Juni 2013.
9. "Pertamina: Kami Berupaya Agar Kuota Tak Jebol," 24 April 2013, <http://www.republika.co.id>, diakses 25 Juni 2013.
10. "Jero Wacik: Harga BBM Premium Idealnya Rp8.000/Liter," 24 November 2012, <http://finance.detik.com>, diakses 25 Juni 2013.